

Strategi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Fraud Dana Desa: Studi Kasus PMD Kabupaten Gowa

Andi Kartika Kusnasriyanti^{1)*}, M. Shidiq Al Mutawakkil²⁾, Linda Arisanti Razak³⁾,
Amril⁴⁾

^{1)*)2)3)4)} Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar
^{1)*} andikartikacendana@gmail.com

Abstrak

Dana Desa memainkan peran penting dalam pembangunan, namun besarnya alokasi dana tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, sehingga berisiko tinggi terhadap kecurangan (*fraud*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi akuntabilitas publik yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa dalam mencegah fraud Dana Desa melalui lensa *Fraud Triangle Theory*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian mengungkap kerentanan *fraud* yang ditandai dengan ketidakberfungsian Sistem Keuangan Desa (SISKUADES) bagi publik. Analisis melalui tiga elemen fraud triangle menunjukkan: (1) Adanya pressure dari ketidakpercayaan masyarakat dan kasus korupsi sebelumnya; (2) Terbukanya opportunity akibat lemahnya pengawasan eksternal dari masyarakat; dan (3) Adanya rationalization dari oknum PMD dengan alasan yang tidak berdasar untuk membenarkan ketidaktransparanan. Disimpulkan bahwa strategi akuntabilitas publik PMD Gowa belum efektif mencegah fraud. Diperlukan penguatan pengawasan eksternal yang independen dan memastikan mekanisme transparansi yang benar-benar dapat diakses masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik, Fraud Dana Desa, Fraud Triangle Theory, Siskudades, Transparansi

Abstract

Village Funds play a crucial role in development, but the large fund allocations are not matched with adequate management capacity, creating a high risk of fraud. This study aims to examine the public accountability strategies implemented by the Village Community Empowerment Office (Dinas PMD) of Gowa Regency in preventing Village Fund fraud through the lens of the Fraud Triangle Theory. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and document studies, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal fraud vulnerabilities, marked by the non-functioning of the Village Financial System (SISKUADES) for public access. Analysis through the three elements of the fraud triangle indicates: (1) The existence of pressure from public distrust and a previous corruption case; (2) The opening of opportunity due to weak external oversight from the community; and (3) The existence of rationalization by certain PMD officials using unfounded reasons to justify the lack of transparency. It is concluded that the public accountability strategy of the Gowa PMD has not been effective in preventing fraud. There is a need to strengthen independent external supervision and ensure transparency mechanisms that are genuinely accessible to the public.

Keywords: Public Accountability, Village Fund Fraud, Fraud Triangle Theory, Siskudades, Transparency

1. PENDAHULUAN

Dana Desa memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memperkuat ekonomi lokal (Sambas & Saputro, 2024). Di lain sisi, besarnya dana yang dikelola tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan di tingkat desa sehingga meningkatkan risiko penyimpangan. Kerentanan pengelolaan keuangan desa ini membuka peluang terjadinya fraud (Dewi, 2024), seperti penyalahgunaan anggaran dan

manipulasi laporan. Dampaknya bersifat sistemik, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial (Lestari & Darma, 2025). Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi kunci agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pelaporan APBDes di Kabupaten Gowa telah mengalami transformasi signifikan dari tahun ke tahun. Perubahan ini dipicu oleh penerapan "Siskudades" (Sistem Keuangan Desa) yang mempermudah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa. Namun, sistem pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini belum memenuhi standar karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi keresahan masyarakat desa di Kabupaten Gowa, yang mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keresahan ini tergambar dari pernyataan salah seorang warga mengenai transparansi Siskudades, yang menyatakan:

"Mengapa Siskudades (Sistem Keuangan Desa) Kabupaten Gowa tidak dapat diakses oleh kami? Padahal, kami ingin mengetahui pengelolaan anggaran dana desa agar dapat turut berkontribusi bagi kemajuan desa."

Padahal, Siskudades merupakan amanat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Mawansyah, 2024). Keberadaannya memberikan dampak positif yang nyata, khususnya bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Dengan sistem ini, PMD di setiap kabupaten dapat lebih optimal dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sehingga hak masyarakat desa untuk mengakses informasi menjadi lebih terjamin.

Dalam meninjau akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbagai faktor penyebab dapat dijelaskan melalui *Fraud Triangle Theory*. Teori ini mencakup tiga elemen utama: *pressure* (tekanan) yang mendorong individu melakukan kecurangan, *opportunity* (kesempatan) yang muncul akibat lemahnya pengawasan, dan *rationalization* (pembenaran) yang digunakan pelaku untuk menjustifikasi tindakannya (Suryandari dkk., 2023). Ketiga faktor tersebut menjadi fokus kajian dalam memahami fenomena *Fraud* dana desa yang terjadi pada proses pengelolaan keuangan desa.

Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pencegahan *Fraud*, penelitian ini mengeksplorasi praktik akuntabilitas publik yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa. Kajian ini berupaya mengungkap bagaimana strategi akuntabilitas publik dijalankan serta bagaimana perannya dalam menanggapi berbagai faktor yang berpotensi memicu terjadinya *Fraud* Dana Desa. Dengan demikian, *Fraud Triangle Theory* digunakan sebagai lensa utama untuk menganalisis strategi akuntabilitas publik dalam mencegah kecurangan pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mengkaji strategi akuntabilitas publik yang diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa dalam pencegahan *fraud* (kecurangan) dana desa melalui lensa *Fraud Triangle Theory*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Fraud Triangle Theory*

Fraud Triangle Theory telah diterapkan secara efektif dalam deteksi kecurangan akuntansi atau kecurangan laporan keuangan (Waromi dkk., 2025). Kecurangan terjadi ketika tiga unsur utama hadir secara bersamaan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam konteks akuntansi sektor publik, termasuk pengelolaan dana desa, teori ini digunakan untuk menjelaskan mengapa aparat desa atau pihak pengelola keuangan publik dapat terlibat dalam tindakan penyimpangan, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan anggaran (Kesuma & Fachruzzaman, 2024; Savira dkk., 2024; Wulandari & Arsyadona, 2025). Dengan memahami ketiga faktor ini, auditor dan pihak pengawas dapat merancang sistem pengendalian internal yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Ketiga komponen utama dalam *Fraud Triangle* adalah Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*) (Schuchter & Levi, 2016). Tekanan mengacu pada dorongan internal atau eksternal yang membuat seseorang merasa perlu melakukan kecurangan, seperti tekanan finansial, target organisasi, atau kebutuhan pribadi. Kesempatan

muncul ketika sistem pengendalian internal lemah atau pengawasan manajerial tidak efektif, sehingga individu merasa dapat melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Sementara itu, Rasionalisasi adalah proses pembenaran moral yang dilakukan oleh pelaku untuk melegitimasi tindakannya, misalnya dengan menganggap tindakannya hanya “meminjam sementara” atau “hal yang wajar dalam situasi tertentu.” Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menjelaskan mengapa individu yang sebelumnya jujur dapat tergoda melakukan kecurangan jika kondisi memungkinkan.

2.2 Transparansi Dana Desa

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat krusial untuk memastikan dana desa (*village funds*) digunakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Junaidi & Adnan, 2023; Putri, 2025). Dari perspektif akuntansi, penggunaan sistem keuangan desa berbasis perangkat lunak (misalnya sistem yang diatur oleh regulasi pemerintah) dapat meningkatkan kualitas pelaporan sehingga memudahkan monitoring dan audit serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Misalnya, penggunaan teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis web, terbukti efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui proses keuangan yang terintegrasi dan pemantauan *real-time* (Mawansyah, 2024). Namun, kendala seperti kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, lemahnya sosialisasi, dan rendahnya kesadaran publik masih menjadi hambatan serius sehingga transparansi formal (laporan keuangan) belum selalu diikuti transparansi substansial (pemahaman dan pengawasan masyarakat) (Abdallah dkk., 2024; Junaidi & Adnan, 2023). Oleh karena itu, transparansi dana desa dalam praktik akuntansi bukan hanya soal pelaporan administratif, tetapi juga soal keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik. Agar dana desa benar-benar efektif dan akuntabel, dibutuhkan implementasi sistem akuntansi formal yang bisa diakses publik, serta peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk ikut memantau.

2.3 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir

Pengelolaan Dana Desa berpotensi menimbulkan celah untuk praktik kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, implementasi strategi akuntabilitas publik yang efektif untuk memastikan dana tersebut mencapai sasaran dan mencegah penyimpangan. Penelitian ini berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa.

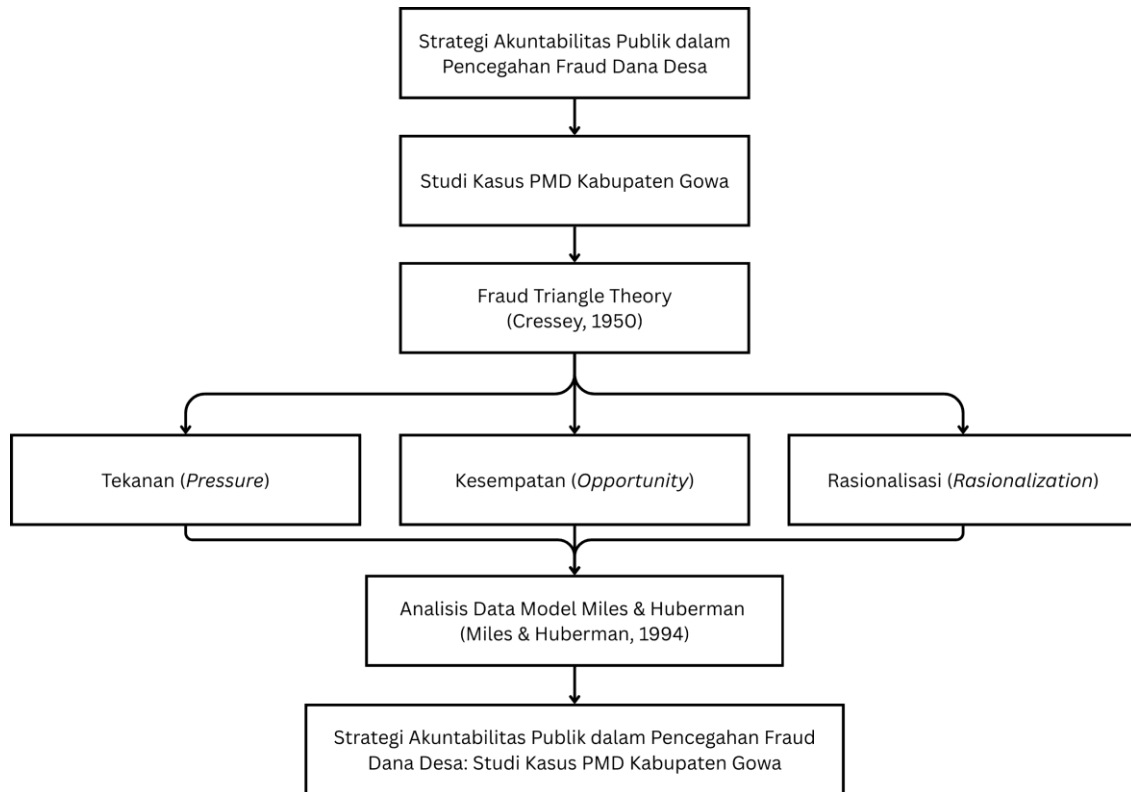
Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, ditemukan bahwa isu akuntabilitas dan potensi fraud pada Dana Desa telah banyak dibahas. Beberapa penelitian terdahulu umumnya mengidentifikasi gejala fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti lemahnya pengawasan internal dan rendahnya transparansi (Bosko & Temu, 2024; Dewila, 2025; Empol dkk., 2025; Fuad & Mustaqin, 2024; Wijayanti dkk., 2025). Namun, belum banyak yang secara spesifik mengkaji strategi akuntabilitas publik yang diimplementasikan oleh organisasi pemerintah seperti Dinas PMD dengan pendekatan teoritis dan kualitatif (studi kasus) yang komprehensif untuk mencegah fraud. Celah inilah yang menjadi landasan sekaligus kontribusi orisinalitas dari penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian terdahulu (sumber: olahan peneliti, 2025)

No.	Identifikasi Studi	Metode dan Sampel Penelitian	Temuan
1	<i>Effectiveness of Village Financial System Implementation (SISKEUDES) in Realizing Accountability and Transparency to Prevent Fraud</i> (Dewila, 2025)	Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel: Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumenter pada pemerintahan desa.	Implementasi SISKEUDES efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Sistem ini mempersulit terjadinya kecurangan karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dilacak, sehingga meminimalkan celah untuk penyimpangan.
2	Analisis Potensi Kecurangan dalam	Metode: Penelitian kualitatif dengan	Ditemukan ketiga elemen Fraud Triangle:

No.	Identifikasi Studi	Metode dan Sampel Penelitian	Temuan
	Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory: Studi Empiris di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (Empol dkk., 2025)	pendekatan studi kasus, dianalisis menggunakan Fraud Triangle (Pressure, Opportunity, Rationalization). Sampel: Studi empiris di Desa Lokomea, melibatkan aparaturnya desa dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pressure: Kebutuhan ekonomi pribadi dan target kerja. • Opportunity: Lemahnya pengendalian internal, pengawasan BPD yang tidak optimal, dan rendahnya transparansi. • Rationalization: Merasa berhak, menganggap hal tersebut sebagai budaya, dan tidak ada sanksi yang tegas.
3	Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement – Study in Central Bengkulu Regency (Wijayanti dkk., 2025)	Metode: Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel: Aparatur desa dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah.	Kepemimpinan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif dalam memitigasi kecurangan dana desa. Kepemimpinan yang kuat dan transparan dapat mendorong keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan pengawasan yang efektif.
4	Peran Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Kompetensi Aparatur dalam Mencegah Fraud Dana Desa: Studi Empiris di Kabupaten Sikka (Bosko & Temu, 2024)	Metode: Penelitian kuantitatif asosiatif. Sampel: Aparatur desa di Kabupaten Sikka.	Kepatuhan dalam pelaporan keuangan dan kompetensi aparaturnya desa terbukti berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa. Kompetensi yang tinggi memastikan laporan keuangan disusun dengan benar, sementara kepatuhan memastikan laporan tersebut disampaikan sesuai regulasi, mengurangi ruang untuk manipulasi.
5	Model Pencegahan Fraud pada Alokasi Dana Desa di Desa Gabus Kabupaten Pati (Fuad & Mustaqin, 2024)	Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel: Pengelola dana desa di Desa Gabus, Kabupaten Pati.	Penelitian ini mengusulkan sebuah model pencegahan fraud yang integratif, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengendalian internal. • Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya desa. • Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui sosialisasi dan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. • Pengawasan partisipatif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Berdasarkan celah dari penelitian terdahulu tersebut, kerangka pikir penelitian ini dibangun dalam penelitian berjudul "Strategi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Fraud Dana Desa: Studi Kasus PMD Kabupaten Gowa" ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi akuntabilitas publik yang diimplementasikan oleh Dinas PMD Kabupaten Gowa. Untuk menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam pencegahan fraud, penelitian ini menggunakan lensa Fraud Triangle Theory (Cressey, 1950), yang memetakan kecurangan ke dalam tiga elemen: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis data model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994), penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana berbagai strategi akuntabilitas publik, seperti transparansi, pelaporan, dan partisipasi masyarakat, dapat memitigasi masing-masing elemen dalam segitiga fraud tersebut.



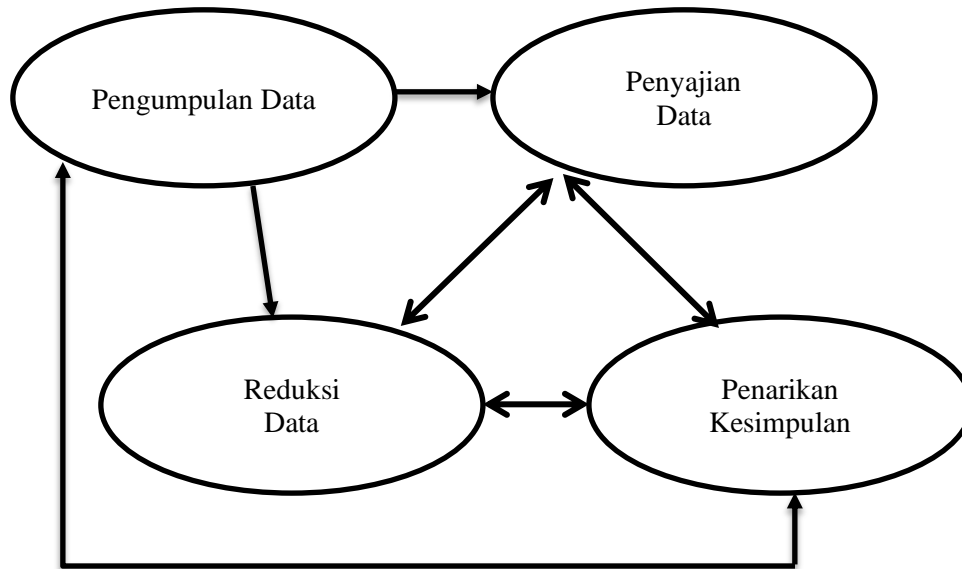
Gambar 1. Kerangka pikir penelitian (sumber: olahan peneliti, 2025)

Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memetakan strategi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan tata kelola Dana Desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pencegahan fraud secara lebih teoritis dan praktis, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena terkait transparansi anggaran dana desa. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa selama satu bulan. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (pejabat struktural PMD) dan informan pendukung (masyarakat desa). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi instansi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Fokus penelitian diformulasikan menggunakan kerangka Fraud Triangle yang mencakup indikator tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).



Gambar 2. Tahapan Analisis Data (Miles & Huberman, 1994)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap data primer dan sekunder, penelitian ini mengungkap temuan mengenai tiga indikator penipuan (*fraud*) dalam pengelolaan anggaran dana desa di Kabupaten Gowa. Temuan untuk masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

4.1 Tekanan (*Pressure*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan dalam pengelolaan anggaran dana desa berpotensi memicu tindakan kecurangan. Di satu sisi, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa menyangkal bahwa tekanan kerja berujung pada fraud. Mereka menekankan bahwa pekerjaan dilakukan secara tim dan telah tersedia sarana transparansi melalui aplikasi SISKUADES. Seperti dinyatakan oleh salah seorang pejabat,

"Tekanan menyimpang itu tidak akan terjadi dikarenakan pegawai di PMD tidak bekerja secara individu akan tetapi bekerja secara tim..."

- Informan AS

Di sisi lain, persepsi masyarakat justru bertolak belakang. Masyarakat menilai ketidakmampuan mengakses SISKUADES merupakan bukti nyata adanya kecurangan yang didorong oleh tekanan. Salah satu informan warga menyatakan,

"...nyatanya siskuaDES tidak dapat diakses, sehingga transparansi pengelolaan anggaran dana desa tidak ada sedikit pun inisiatif dari pihak pengelola. Hal ini diakibatkan adanya tekanan..."

- Informan AB

Dukungan atas temuan ini diperkuat dengan bukti bahwa situs SISKUADES tidak dapat diakses publik serta adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala DPMD Gowa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tekanan, baik internal maupun eksternal, yang berpotensi menciptakan lingkungan untuk terjadinya fraud.

4.2 Kesempatan (*Opportunity*)

Temuan pada indikator kesempatan juga menunjukkan perbedaan persepsi antara pengelola dan penerima layanan. Pihak DPMD meyakini bahwa pengawasan dan pengontrolan internal yang ketat, serta komitmen untuk transparansi melalui SISKUADES, telah menutup celah untuk berbuat curang. Seorang pejabat menegaskan,

"Kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan (Fraud) di kantor PMD tidak akan terjadi, hal disebabkan kami melakukan pengawasan dan pengontrolan secara berkala..."

- Informan AC

Selanjutnya, temuan dari masyarakat justru mengonfirmasi bahwa kesempatan untuk melakukan fraud tetap terbuka lebar. Ketidakmampuan mengakses SISKUADES dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan eksternal, sehingga memberi kesempatan bagi oknum untuk

menyimpang. Seorang informan warga menyimpulkan, "Tindakan menyimpang Di Kantor DPMD Kabupaten Gowa ada karena adanya kesempatan yang diberikan. Ini dapat dilihat di web siskudades yang tidak transparansi kepada kami...". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan partisipatif dari masyarakat, yang diwakili oleh ketidakberfungsian SISKUADES, justru menciptakan opportunity untuk terjadinya tindakan kecurangan.

4.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pada indikator rasionalisasi, kembali terlihat gap antara klaim institusi dan realita di lapangan. Pihak DPMD secara seragam menyangkal adanya praktik rasionalisasi di kantor mereka, dengan alasan semua tindakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Seorang pejabat tinggi menyatakan,

"Untuk rasionalisation saya rasa tidak ada di kantor PMD... karena kami bekerja atas dasar aturan..."

- Informan AF

Di sisi lain, masyarakat menemukan pembenaran yang tidak logis dari DPMD, khususnya terkait alasan tidak berfungsinya SISKUADES. Masyarakat menganggap alasan yang diberikan, seperti web yang di-hacking, adalah bentuk rasionalisasi untuk menutupi ketidaktransparanan. Seorang warga berkomentar,

"...dengan alasan itulah saya rasa mereka membenarkan kesalahan mereka demi kepentingan yang ada, padahal Undang-undang... mengamanahkan untuk transparan..."

- Informan AZ

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya rasionalisasi oleh oknum DPMD dengan memberikan alasan yang tidak sejalan dengan regulasi untuk membenarkan tindakan tidak transparan mereka dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dianalisis bahwa transparansi pengelolaan anggaran dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa menunjukkan indikasi kerentanan terhadap penipuan (*fraud*) yang dapat dijelaskan melalui lensa *Fraud Triangle*.

Pertama, terkait indikator tekanan (*pressure*), penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara klaim institusional dan persepsi masyarakat. Meskipun pihak DPMD menyatakan bahwa tekanan kerja dapat dikelola melalui sistem kerja tim, ketidakmampuan masyarakat mengakses SISKUADES, yang dijanjikan sebagai sarana transparansi, justru menciptakan tekanan eksternal berupa ketidakpercayaan publik. Ketidakaksesan ini, yang dibarengi dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala DPMD, memperkuat dugaan bahwa tekanan, baik internal maupun eksternal, berpotensi mendorong perilaku menyimpang. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Beilulik dkk., 2022; Orno dkk., 2025) yang menyoroti bahwa pengelolaan dana desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan justru menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyimpangan.

Kedua, Pada indikator kesempatan, celah untuk terjadinya *fraud* terutama diciptakan oleh lemahnya pengawasan eksternal. Klaim DPMD bahwa pengawasan internal yang ketat telah meminimalisir kesempatan berbuat curang bertolak belakang dengan realita ketidakberfungsian SISKUADES. Hasil ini sejalan dengan temuan (Sarinastiti & Bhilawa, 2023) yang menekankan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan masyarakat memberikan kesempatan (*opportunity*) bagi terjadinya penyimpangan, meskipun secara formal pengawasan internal telah dijalankan. Penelitian (Nasution, 2025) juga mengkonfirmasi bahwa lemahnya pengawasan partisipatif merupakan faktor kunci yang membuka kesempatan untuk *fraud*. Dalam konteks Gowa, ketidakberfungsian SISKUADES menghilangkan peran serta masyarakat dan menciptakan *opportunity* bagi oknum tertentu, sebagaimana terbukti dalam kasus korupsi pengadaan truk sampah.

Ketiga, pada indikator rasionalisasi, penelitian ini menemukan bahwa pihak DPMD menggunakan pembenaran yang tidak logis dan tidak berdasar hukum untuk menjustifikasi ketidaktransparanan mereka. Pola ini konsisten dengan temuan (Sulila, 2022) yang mengungkap adanya rasionalisasi dari aparat desa dengan mengatasnamakan prosedur formal untuk menutupi ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi. Penelitian (Empol dkk., 2025) juga menemukan praktik rasionalisasi serupa di mana pihak pengelola dana desa membenarkan tindakan

mereka dengan alasan teknis dan administratif, meskipun bertentangan dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014. Dalam kasus Gowa, rasionalisasi dengan alasan hacking pada SISKUADES digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya menyimpang.

Ketiga elemen Fraud Triangle ini saling berkaitan. Tekanan dari lingkungan kerja dan eksternal, ditambah dengan kesempatan yang terbuka lebar akibat lemahnya pengawasan, kemudian dibenarkan melalui rasionalisasi yang tidak accountable, menciptakan ekosistem yang subur bagi terjadinya fraud. Kasus korupsi yang telah terbukti menjadi bukti empiris dari kerentanan ini. Oleh karena itu, temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat pengawasan eksternal yang independen dan memastikan mekanisme transparansi yang benar-benar dapat diakses masyarakat, agar celah untuk tindakan penipuan dalam pengelolaan dana desa dapat ditutup.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara klaim transparansi yang disampaikan oleh PMD Kabupaten Gowa dengan realitas di lapangan. PMD dinilai melakukan tindakan menyimpang (*fraud*) dalam pengelolaan anggaran dana desa, yang ditandai dengan ketidakfungsian aplikasi SISKUADES bagi masyarakat dengan alasan yang tidak jelas sejak tahun 2021. Hal ini membuktikan tidak adanya transparansi yang efektif dan kegagalan PMD dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dari perspektif masyarakat, kondisi ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang terus berlangsung akibat lemahnya sistem pengawasan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., Rahayu, S., Yudi, Y., & Herawaty, N. (2024). Implementation of Accountability in Village Fund Management: Systematic Literature Review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7). <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.9596>
- Beilulik, S. H., Widarjo, W., & Rachmadani, W. S. (2022). The Effect Quality of Supervision of Village Consultative Body and Community Participation in Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 06(10), 33–44. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2022.61003>
- Bosko, M. D., & Temu, T. J. (2024). Peran Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Kompetensi Aparatur dalam Mencegah Fraud Dana Desa: Studi Empiris di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 11(3), 33–40. <https://doi.org/10.59603/projemen.v11i3.877>
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Dewi, P. A. (2024). Individual Morality and Internal Control Systems on Indications of Fraud Prevention in Village Financial Management in Indonesia: A Literature Review. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 211–224. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i2.330>
- Dewila, D. (2025). Effectiveness of Village Financial System Implementation (SISKEUDES) in Realizing Accountability and Transparency to Prevent Fraud. *Golden Ratio of Finance Management*, 5(1), 88–100. <https://doi.org/10.52970/grfm.v5i1.942>
- Empol, V. Y., Kerih, A. S. Y., & Dethan, M. (2025). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory: Studi Empiris di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 208–222. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1982>
- Fuad, K., & Mustajin, K. (2024). Model Pencegahan Fraud pada Alokasi Dana Desa di Desa Gabus Kabupaten Pati. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 8(1), 305–317. <https://doi.org/10.30738/ad.v8i1.14200>
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). Transparency and Accountability of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.69989/b216ta79>

- Kesuma, A. P., & Fachruzzaman, F. (2024). Analysis of Internal Control and Fraud Prevention Efforts in Public Sector Accounting. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5212>
- Lestari, D. N. L., & Darma, I. G. M. (2025). Systematic Literature Review (SLR): Transparency And Accountability In Village Financial Management. *International Journal of Economics, Accounting and Management*, 1(5), 309–314. <https://doi.org/10.60076/ijeam.v1i5.938>
- Mawansyah, J. (2024). Digital Transformation of Village Finance: Web-Based SISKEUDES Design for Enhancing Transparency and Accountability in Naru Village, Bima Regency. *Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS)*, 7(2), 188–196. <https://doi.org/10.35335/idss.v7i2.229>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook: By Mathew B. Miles and A. Michael Huberman. Thousand Oaks: Sage, 1994. 338 pp. £19.95 paperback. ISBN 0 8039 5540 5. *Journal of Environmental Psychology*, 14(4), 336–337. [https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80231-2](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80231-2)
- Nasution, I. R. (2025). Investigative audit of irregularities in village fund management. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 26(3), 2426–2431. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.26.3.2417>
- Orno, A. B., Salle, A., & Wonar, K. (2025). The Effect of Supervision and Transparency Management of Village Funds on Community Trust in Kampung Yahim Jayapura District. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(12), 2428–2437. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i12.946>
- Putri, E. P. (2025). Optimalisasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam APBN 2025. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 3(1), 30–40. <https://doi.org/10.61476/1781gc34>
- Sambas, M., & Saputro, G. E. (2024). Village Fund Management On The Improvement Of Community Economy: English. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*, 3(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.981>
- Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa dan Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 199–214. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26417>
- Savira, D., Siboro, S. F., & Shafa, S. (2024). Peran Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi*, 3(2), 226–235. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.2003>
- Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle revisited. *Security Journal*, 29(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Sulila, I. (2022). *The Effect of Community Participation and Supervision on the Effectiveness of Village Fund Policy Implementation in Indonesia*: International Conference on Communication, Policy and Social Science (InCCluSi 2022), Medan, Indonesia. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_42
- Suryandari, N. N. A., Yadnyana, I. K., Ariyanto, D., & Erawati, N. M. A. (2023). Implementation of fraud triangle theory: A systematic literature review. *Journal of Governance and Regulation*, 12(3), 90–102. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i3art10>
- Waromi, J., Siti Rofingatun, & Dytha M Nababan. (2025). SYSTEMATIC ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FRAUD TRIANGLE THEORY IN ACCOUNTING FRAUD DETECTION: A LITERATURE REVIEW OF PRESSURE, OPPORTUNITY, AND RATIONALISATION. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(3), 4386–4397. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15905>
- Wijayanti, I. O., Herawansyah, Putra, D. A., & Utomo, B. (2025). Mitigating Village Fund Fraud in Indonesia: The Role of Leadership, Transparency, and Community Engagement – Study in Central Bengkulu Regency. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(6), 1922–1935. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v7i6.284>

Wulandari, S. & Arsyadona. (2025). Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah dalam Mitigasi Risiko Fraud pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 223–238. <https://doi.org/10.61132/rimba.v3i1.1594>

Biodata Penulis

Andi Kartika Kusnasriyanti, dapat berisikan tempat dan / atau tanggal lahir. Berikutnya narasi mengenai latar belakang pendidikan penulis yang mencakup jeis gelar dalam bidang apa, lembaga, kota, negara, dan tahun gelar itu diperoleh. Selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah pekerjaan/kesibukan penulis saat ini. Jika disediakan sebuah foto, maka biografi di sekitarnya akan menjorok dan foto ditempatkan di kiri atas dari biografi.

M. Shidiq Al Mutawakkil, dapat berisikan tempat dan / atau tanggal lahir. Berikutnya narasi mengenai latar belakang pendidikan penulis yang mencakup jeis gelar dalam bidang apa, lembaga, kota, negara, dan tahun gelar itu diperoleh. Selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah pekerjaan/kesibukan penulis saat ini. Jika disediakan sebuah foto, maka biografi di sekitarnya akan menjorok dan foto ditempatkan di kiri atas dari biografi.